

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Ali, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Edisi ke-2). Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2021). Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kebijakan dan sistem hukum nasional. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Cetakan ke-1). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Friedman, L. M. (2018). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (M. Khozim, Penerjemah). Bandung: Nusa Media.
- Hamzah, A. (2018). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Ketiga). Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-13). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, B. N. A. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT.
- Muladi. (2020). *Hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana*. Bandung: Alumni.
- Putri, E. A. (2019). *Monograf Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Putri, E. A. (2024). *Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Pemahaman Masyarakat tentang Keselamatan Jalan Raya*. Jakarta: Penerbit Nasional.
- Rahardjo, M. (2020). *Perilaku Pengemudi dan Keselamatan Lalu Lintas*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Bandung: Cipta Media Nusantara.

Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*

Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan ke-3)*. Jakarta: UI-Press.

Soekanto, S. (2020). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

Sudarto, S. (1999). *Hukum Pidana dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Widiana, I. K. (2022). *Aspek Yuridis Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia*.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

ARTIKEL JURNAL ILMIAH

Artawijaya, I. W. A. (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Buleleng: Kajian Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jurnal Magister Hukum Udayana (JMHU), 10(2), 215–230.*

Dewi, N. P. K., Yulianti, N. P. R., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jember.

Dewi, I. A. P. M., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131dewi

Fathir, M. R. (2021). Efektivitas Razia Kendaraan Bermotor dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas. Tesis, Universitas Mataram. https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/M.-FATHIR-RAMADHAN_D1A016172.pdf

Gunawan, I. W. (2023). Fenomena Balapan Liar Sepeda Motor pada Remaja: Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(1), 55–72. Denpasar: Universitas Warmadewa. ISSN: 2356-4016.

Irlanda, H. N., & Askarial, A. (2025:15). Dinamika Sosial Remaja Pelaku Balap Liar di Kota Pekanbaru (Studi Pada Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*

Muntari, A., Apriano, I. D., & Simatupang, Y. S. (2023). Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Lalu Lintas Pada Pn Tanjung Karang. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*.

Nasution, B. J. (2022). Penegakan hukum pidana lalu lintas dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 503–517.

Pratama, D. Y., & Yulianti, E. (2023). Sensation seeking, optimism bias, dan kecenderungan melanggar batas kecepatan: Studi kuantitatif pada pengemudi muda di Bali. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*,

12(1), 19–38.

Putra, I. N. A. W. (2022). Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Meningkatkan Kepatuhan Berlalu Lintas: Studi di Wilayah Polda Bali. *Jurnal Kajian Hukum Udayana*, 7(2), 180–196. Denpasar: Universitas Udayana. ISSN: 2303-0062.

Putri, N. L. I. R., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 120-137.

Rahma, S. (2020). Globalisasi dan Fenomena Kenakalan Remaja. Repository IAIN Palopo.

Santoso, A. (2021). Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(1), 45-60.

Santoso, I. (2021). Pelaksanaan Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia: Hambatan dan Solusi dari Perspektif Kebijakan Kriminal. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 312–330. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. ISSN: 0854-

Sari, R. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Kajian Resolusi Konflik*,

Saryana, S. (2023). Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 22(2), 301–315.

Sastrawan, I. M. (2022). Analisis Implementasi Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Mewujudkan Tertib Berlalu Lintas di Bali: Perspektif Efektivitas Hukum. *Jurnal Hukum Undiksha*.

Sastrawan, I. M. (2022). Analisis Implementasi Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Mewujudkan Tertib Berlalu Lintas di Bali: Perspektif Efektivitas Hukum. *Jurnal Hukum Undiksha*, 6(2), 102–118.

WiraSena, I. G. A., & Arta, I. K. K. (2022). Implikasi yuridis kenakalan remaja dalam dunia balap liar. *Kertha Widya*, 9(2), 60-66.

Sinaga, A. C. D., Lengkong, L. Y., & Panjaitan, H. F. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pengendara yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan lalu lintas.

Suriadana, I. G. (2019). Implementasi Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng: Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum Undiksha*, 9(1), 45–62. Singaraja: Undiksha. ISSN: 2722-0982.

Sutanto, H., & Wijaya, E. (2022). Pelanggaran batas kecepatan sebagai faktor risiko kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Keselamatan Transportasi*, 9(2), 121–135.

Wibowo, R. (2022). Kampanye Keselamatan Lalu Lintas: Strategi dan Implementasi. *Jurnal Keselamatan Jalan*, 10(2), 123-135

Widastra, I. M. (2020). Situasi dan Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas pada Pengguna Sepeda Motor Pelajar di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Hukum Krida Wacana Undiksha*, 5(1), 78–94. Singaraja: Undiksha. ISSN: 2579-9525.

- Widia, N. L. O. (2019). Penanggulangan Balapan Motor Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 4(2), 40-50
- Wiranatha, A., & Riani, D. (2021). Studi perilaku keselamatan berkendara pada pengendara sepeda motor di Kota Palangka Raya. *Narotama Jurnal Teknik Sipil*, 5(2), 23-27.
- Yudistira, I. K. (2018). Efektivitas Pengetatan Penindakan dan Giat Operasi Zebra dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Undiksha*, 4(1), 31–48. Singaraja: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksha. ISSN: 2301-7295.
- Yulianto, A., & Pramono, S. (2021). Kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. *Jurnal Civics*, 18(1), 14–26.
- Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2023). Peran kepolisian dalam upaya penanggulangan balapan liar di Kota Singaraja. *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 152–162.
- Yuliartini, N. P. R. (2022). Tinjauan umum tentang kriminologi, kenakalan anak, balapan liar dan penanggulangan kenakalan. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(2).
- Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 147–159.
- Zainuddin, M., Mubarak, Z., & Bachriani, R. (2022). Politik hukum *restorative justice* dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Semarang Law Review*, 3(1), 120–129.

Artikel Dalam Internet

Speed Gun, Pengawas Kecepatan Kendaraan. Diakses dari [https://www.aca.co.id/Berita-Detail/Speed-Gun-Pengawas-Kecepatan-toyota Astra Motor](https://www.aca.co.id/Berita-Detail/Speed-Gun-Pengawas-Kecepatan-toyota-Astra-Motor). (t.t.). Arti istilah *speeding* dalam dunia otomotif dan lalu lintas. Diakses pada 28 April 2026, dari <https://www.toyota.astra.co.id/corporate-information/news-promo/read/arti-istilah-speeding-dalam-dunia-otomotif-dan-lalu-lintas>

Skripsi

Iskandar, S. (2022). Metode Penelitian Hukum Empiris: Pendekatan Sosiologis Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Ringan. Eprints UMMetro.

Rahmatina, M. (2020). *Penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Sumber Data dan Dokumen Resmi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng. (2025). Kabupaten Buleleng dalam Angka 2025. Singaraja: BPS Kabupaten Buleleng.

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. (2025). Laporan Tahunan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Buleleng Tahun 2023. Singaraja: Dishub Kabupaten Buleleng.

Kantor Bersama Samsat Singaraja. (2025). Rekapitulasi Data Kendaraan Bermotor Terdaftar Aktif Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2025. Singaraja: Samsat Singaraja

Satlantas Polres Buleleng. (2025). Laporan Rekapitulasi Data Pelanggaran, Tilang, dan Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2025.

Singaraja: Dokumen Internal Satlantas Polres Buleleng.

Peraturan Perundang Undangan

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Lalu Lintas*. Jakarta: Mabes Polri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 79. Pasal 287 ayat (5).

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96.

Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara RI Tahun 2013

Nomor 193.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

